

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Untuk menyikapi hal tersebut, dalam rangka mengatur pemerintahan, maka dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat agar dapat mengelola daerah atau wilayahnya sendiri. Kewenangan ini diberikan karena mengingat bahwasanya setiap daerah itu mempunyai kebutuhan yang beragam sehingga pemerintah daerah sendiri itulah yang lebih paham mengenai situasi di daerahnya tersebut. Sesuai dengan pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>1</sup> Hal ini mencerminkan penerapan desentralisasi di Indonesia, dimana wewenang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dapat mengelola daerahnya secara mandiri.<sup>2</sup>

Otonomi daerah merupakan wujud diterapkannya desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, serta tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya dapat mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan.<sup>3</sup> Wewenang, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara tidak langsung berarti

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 1

<sup>3</sup> Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cetakan 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 52

memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk dapat merancang atau membuat suatu kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Peningkatan pemberdayaan pelayanan masyarakat serta peran serta masyarakat adalah tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah.<sup>4</sup> Selain itu, untuk membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri. Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta mengurangi adanya disparitas antar daerah juga menjadi harapan yang besar dari pemberian otonomi daerah ini sehingga nantinya daerah akan menjadi lebih mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

Keberhasilan implementasi dari otonomi daerah secara langsung tentunya tidak terlepas pada kinerja pemerintah terutama dalam mengoptimalkan kemampuan untuk melakukan tata kelola keuangan daerah yang efektif.<sup>5</sup> Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, tata usaha, serta monitoring keuangan daerah.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengelolaan terhadap keuangan daerah menjadi aspek krusial dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang baik atau *Good Governance*. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang baik harus dimiliki oleh daerah otonom.

---

<sup>4</sup> Lince Magriasti, M. Fernanda, dan Aldri Frinaldi, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, 2023, hal. 2409

<sup>5</sup> Mohamad Nur Afandi dan Ropen Sianipar, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan", *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 19, No. 2, 2016, hal. 1

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 233

Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam kinerja keuangan. Dengan demikian, pencapaian terhadap hasil kerja pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.<sup>7</sup> Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan secara efektif, maka menunjukkan bahwa kinerja keuangannya baik. Analisis terhadap kinerja keuangan bertujuan untuk melakukan pengukuran serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah, potensi daerah, kondisi keuangan, serta memastikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dalam melaksanakan kebijakan terkait anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Blitar sendiri memiliki daya tarik potensi dan kekayaan yang bukan hanya pada sumber daya alam produksi hasil bumi yang melimpah, hasil-hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.<sup>8</sup> Disisi lain baik dalam kegiatan ekonomi, secara spasial memiliki keunggulan yang berpotensi tinggi. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar,

---

<sup>7</sup> George M.V. Kawung dan Steeva Y.L. Tumangkeng, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 2, 2020, hal. 2

<sup>8</sup> (<http://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/> diakses pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 09.00 WIB)

apabila pemerintah mampu menggali potensi-potensi tersebut maka dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan hal ini dapat menunjukkan kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, potensi tersebut secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan atas kinerja keuangan daerah.<sup>9</sup>

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan berbagai studi penelitian yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan khususnya pada pemerintah daerah. Beberapa dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Heri Faisal Harahap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2016-2018 dengan menggunakan 3 rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi, rasio efektivitas serta rasio ketergantungan.<sup>10</sup> Endang Purwanti dan Elien Noviyanti meneliti pada Pemerintah Daerah Kota Salatiga tahun 2014-2018 dengan menggunakan 4 rasio keuangan yaitu rasio efektivitas PAD, rasio keserasian, rasio efisiensi keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan, belanja, dan PAD.<sup>11</sup> Deby Kusuma Atmaja dan Risdiana Himmati juga melakukan penelitian pada Wilayah Mataraman Tahun 2019-2020 dengan menggunakan 4 rasio keuangan yaitu rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, serta rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ni Putu Gina Sukma Antarai dan Ida Bagus Panji Sedana, "Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 1083

<sup>10</sup> Heri Faisal Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah", *Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 34-38

<sup>11</sup> Endang Purwanti dan Elien Noviyanti, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018", *Jurnal Among Makarti*, Vol. 14, No. 2, 2021, hal. 1-12

<sup>12</sup> Deby Kusuma Atmaja dan Risdiana Himmati, "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Mataraman Tahun 2019-2020", *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 1-16

Kajian penelitian kali ini, peneliti mencoba melakukan analisis serupa untuk memperoleh bukti empiris bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, sebagaimana di jelaskan pada penulisan sebelumnya yang dilakukan di berbagai daerah dengan waktu yang berbeda memiliki informasi yang menarik dan karakteristik yang variatif, sehingga peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti Kabupaten Blitar dalam kurun waktu yang dibatasi yaitu 2021 hingga 2023. Dengan berbagai latar belakang pengambilan kurun waktu dan objek tersebut penelitian kali ini diharapkan informatif sehingga dapat menjadi masukan bagi daerah lain.

Data yang menarik diperoleh kembali ketika peneliti mengkaji perkembangan anggaran pendapatan Kabupaten Blitar dari tahun 2021 - 2023, pada tahun tersebut terjadi fluktuatif dimana terjadi kondisi pendapatan yang tidak stabil. Rincian anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir tergambar pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar Tahun**  
**2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>
2021	407.530.973.690,43
2022	422.738.491.399,68
2023	411.642.913.437,44

Sumber : LRA Kabupaten Blitar 2021-2023 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Blitar mengalami kenaikan pada tahun 2022. Dijelaskan pada tahun 2021 sebesar Rp 407.530.973.690,43 mengalami

kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp 422.738.491.399,68. Sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 411.642.913.437,44. Dengan adanya PAD yang mengalami fluktuasi menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar menjadi poin penting untuk diteliti karena berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, sangat dibutuhkannya alat ukur kinerja untuk mengukur pencapaian dan kegagalan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah.<sup>13</sup>

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain – lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.<sup>14</sup>

Penelitian kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada periode penelitian dengan tahun terbaru. Diharapkan dapat menambah dan memperluas informasi mengenai analisis laporan kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjang penelitian

---

<sup>13</sup> Dwi Moni Estuti dan Teti Anggita Safitri, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo”, *Jurnal Among Makarti*, Vol. 16, No. 1, 2023, hal. 13

<sup>14</sup> BPKAD Kab. KulonProgo, “Klasifikasi Belanja Daerah” dalam <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1246/klasifikasi-belanja-daerah> diakses 9 Januari 2024, pukul 09.00 WIB

sebelumnya sebagai penegas bahwa masing-masing daerah dalam waktu yang berbeda memiliki hasil yang berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengukur dan evaluasi kinerja keuangan daerah kabupaten lain umumnya dan khususnya tata kelola keuangan pemerintah kabupaten Blitar. Lebih mendalam lagi peneliti mengharapkan dengan judul tersebut menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

Dalam penelitian ini, penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menggunakan 6 rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, serta rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kemandirian keuangan pemerintah daerah.<sup>15</sup>

Rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan jumlah penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.<sup>16</sup>

Rasio desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah penerimaan daerah. Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap semua penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi

---

<sup>15</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), hal. 140

<sup>16</sup> *Ibid.*

PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi.<sup>17</sup>

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD yang diterima. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.<sup>18</sup>

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini menggambarkan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Jika hasil penghitungan kurang dari 100%, maka dinilai telah efisien. Tetapi, jika hasil penghitungan lebih dari 100%, maka mengindikasikan adanya pemborosan anggaran.<sup>19</sup>

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur persentase perubahan pendapatan maupun belanja dari periode satu ke periode berikutnya. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai.<sup>20</sup> Dengan menggunakan rasio ini akan terlihat apakah pendapatan maupun belanja mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan khususnya pada pertumbuhan pendapatan tersebut mengalami kenaikan atau positif. Keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan belanja sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas keuangan daerah. Jika

---

<sup>17</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*,..., hal. 141

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 164

<sup>20</sup> Rigel Nurul Fathah, "Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal EBBANK*, Vol. 8, No. 1, 2017, hal. 45

pertumbuhan belanja tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, dapat mengakibatkan defisit fiskal yang mengancam kesehatan anggaran daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan peneliti melakukan penelitian penting dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat umum bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan dan menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dilakukan secara transparansi. Transparansi yang dimaksud ialah pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Lebih dari itu, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan alat analisis rasio. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah dengan mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2023”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam menganalisis suatu laporan keuangan daerah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan keuangan daerah yang tentunya dihadapi pemerintah daerah yang berkaitan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah, permasalahan tersebut meliputi:

1. Masih bergantungnya pemerintah di daerah terhadap subsidi pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besarnya transfer pemerintah pusat dari anggaran rutin maupun dari anggaran pemerintah
2. Kemampuan daerah yang masih rendah dalam menggali potensi dari sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer.
3. Kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan sumber - sumber pendapatan yang ada yang masih kurang.

Hasil dari analisis rasio keuangan daerah dalam penelitian nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan yang dilihat dari beberapa rasio seperti : Rasio kemandirian, ketergantungan, desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, dan pertumbuhan. Dengan diberikannya hasil dari analisis kinerja keuangan tersebut akan menggambarkan bagaimana kondisi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Blitar.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Ketergantungan?

3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Desentralisasi?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Efektivitas PAD?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja?
6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Pertumbuhan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Kemandirian.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Ketergantungan.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Desentralisasi.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Efektivitas PAD.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja.
6. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai pengembangan teori atau keilmuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal kinerja keuangan daerah.

#### b. Bagi Akademik

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan menggunakan rasio keuangan. Penghitungan rasio ini berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Penelitian ini dibatasi hanya menggunakan 6 rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, serta rasio pertumbuhan. Selain itu,

hanya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2023.

## **G. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah yang menyajikan data keuangan secara terstruktur atas transaksi yang dilakukan.<sup>21</sup>

#### b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.<sup>22</sup>

#### c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan tingkat kinerja atau pencapaian atas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai maksud, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah.<sup>23</sup>

#### d. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian yang diraih oleh pemerintah daerah dalam mengelola

---

<sup>21</sup> Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 7

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang "Pengelolaan Keuangan Daerah"

<sup>23</sup> Muhamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 25

keuangan dengan baik dan benar.<sup>24</sup> Dalam melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan rasio keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.<sup>25</sup> Rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan diantaranya:

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari eksternal atau luar serta menggambarkan seberapa besar tingkat partisipasi atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan masyarakat.<sup>27</sup>

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi.<sup>28</sup>

3) Rasio Desentralisasi

Rasio desentralisasi merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2011 ), hal. 2

<sup>25</sup> Rahayu, Rizkiza Aurin, dan Iskandar Sam, “Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, 2023, hal. 1546

<sup>26</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 104

<sup>27</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*,..., hal. 233

<sup>28</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*,..., hal. 140

<sup>29</sup> Sahala Purba dan Ruthmana Christin Hutabarat, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 228

#### 4) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>30</sup>

#### 5) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>31</sup>

#### 6) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode satu ke periode berikutnya dilihat dari pendapatan maupun belanja.<sup>32</sup>

## 2. Definisi Operasional

### a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu catatan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah yang disajikan

---

<sup>30</sup> Nurul Wahyuni, Baso R, dan Sumarni S, “Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba”, *Tangible Journal*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 45

<sup>31</sup> Nur Hasanah dan Elok Dwi Vidiyastutik, “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo”, *Jurnal Ecobuss*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 29

<sup>32</sup> Rigel Nurul Fathah, Analisis Rasio Keuangan,...., hal. 45

secara terstruktur yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk kepentingan publik.

c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu gambaran yang berkaitan dengan tingkat pencapaian atas pengelolaan keuangan daerah.

d. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan analisis terhadap tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan, yaitu membandingkan angka-angka pada laporan keuangan. Rasio keuangan yang digunakan diantaranya:

1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dihitung dengan cara membagi jumlah PAD dengan jumlah pendapatan transfer.

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan cara membagi jumlah pendapatan transfer dengan jumlah pendapatan daerah.

3) Rasio Desentralisasi

Rasio desentralisasi dihitung dengan cara membagi jumlah PAD dengan jumlah pendapatan daerah.

4) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membagi realisasi penerimaan PAD dengan target (anggaran) penerimaan PAD.

5) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan cara membagi realisasi belanja dengan target (anggaran) belanja.

6) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pendapatan dihitung dengan cara menghitung selisih pendapatan tahun yang dihitung dengan pendapatan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya.

Rasio pertumbuhan belanja dihitung dengan cara menghitung selisih realisasi belanja tahun yang dihitung dengan realisasi belanja tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan realisasi belanja tahun sebelumnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, ruang

lingkup serta keterbatasan penelitian, dan juga penegasan istilah yang meliputi definisi konseptual dan operasional. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan deskripsi variabel, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan interpretasi hasil penelitian.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.